

Teroris Teriak Teroris

ANALISIS BUDAYA

ARIEL HERYANTO

Profesor Emeritus dari Universitas Monash, Australia



Serbuan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela serta penculikan kepala negara di sana dan istrinya bukan hal baru bagi para pengamat. Apalagi bagi kebanyakan rakyat di Amerika Selatan. Sudah puluhan tahun (dengan presiden berbeda-beda) pemerintahan AS melakukan hal yang sama atau mirip.

Korban imperialisme AS tidak hanya kawasan Amerika Selatan. Korban mereka tersebar di sejumlah wilayah dunia, termasuk Timur Tengah. Yang dilakukan AS terhadap Chile (1973) mengulang operasi mereka di Indonesia (1965). Dalam kedua kasus, AS menjadi "kekuatan asing" yang disambut militer di dalam negeri di kedua negara untuk menggulingkan kepala negara untuk berideologi kiri.

Di akhir 1950-an, AS mendukung gerakan pemberontak di Indonesia yang gagal. Menteri Sumitro Djojohadikusumo dianggap terlibat dan partainya (Partai Sosialis Indonesia) dilarang. Kini, putranya, Presiden Prabowo Subianto, sering menebar tuduhan adanya "kekuatan asing" dan "antek asing".

Operasi militer AS awal 2024 mirip kisah armada Ero-

pa ratusan tahun lalu menjelajah berbagai pelosok dunia. Mereka mendarat di berbagai benua, membunuh penduduk lokal, dan menjarah sumber alam di tanah jajahan. Tidak hanya di Asia dan Afrika, tetapi juga di Amerika dan Australia.

Di masa keemasan kolonialisme Eropa, pemahaman negara berdaulat masih terbatas. Kalaupun ada semacam tata hukum internasional, maknanya jauh berbeda dari yang kita kenal setelah diresmikannya Piagam PBB. Sebelumnya, siapa saja dengan senjata kuat bisa menjarah harta dan martabat pihak yang lebih lemah. Masa kolonial dari beberapa abad yang lalu itu kini seakan-akan diproklamasikan kembali oleh Presiden AS Donald Trump dengan menyatakan hukum internasional tidak berlaku untuk ambisi imperialisnya.

Jatuhnya Venezuela dalam hitungan jam di tangan pasukan AS juga mengingatkan kita pada jatuhnya RI di Yogyakarta dalam agresi militer kedua Belanda (1948). Bedanya, Sukarno tidak diculik dan diadili di Belanda. Beda lain yang lebih penting di pertengahan abad lalu PBB punya kekuatan besar. Agresi militer Belanda

Selain membina kelompok paramiliter dan memanipulasi bahasa, terorisme negara juga membajak aparatus hukum.

gamaan. Kini terorisme negara tampaknya mendekati atau mencapai puncak kejayaan dalam sejarahnya yang panjang. Terorisme negara tidak bekerja sendirian. Negara-negara lebih kecil atau lebih lemah dibina dengan watak teroris juga. Indonesia semasa pemerintahan Orde Baru menjadi salah satu dari banyak contoh hasil bi-naan hegemoni Blok Barat dalam Perang Dingin melawan Blok Komunis.

Sudah berpuluh tahun yang lalu para peneliti menyadari organisasi teroris terbesar di dunia adalah negara, baik yang berkiblat pada ideologi kapitalis, komunis, maupun ke-

an AS, terutama setelah se-rangan 9/11 (2001). Sejak itu label "terorisme" diobral murah meriah dalam wacana publik di AS dan di banyak negara lain untuk memberikan stigma pada gerakan non-negara atau negara yang dianggap musuh.

Label "teroris" dipakai PM Israel untuk menjuluki mereka yang menjadi korban genosida di Gaza atau kelompok anti-genosida. Label "teroris" diobral Presiden Trump di AS terhadap berbagai pihak yang menentang kebijakannya soal imigrasi. Presiden Prabowo menggunakan label yang sama terhadap peserta protes jalan di Jakarta Agustus 2025. Sebagian jurnalis, *influencers* dan warga awam ikut menyebarkan label "teroris" dengan makna berbeda-beda.

Selain membina kelompok paramiliter dan memanipulasi bahasa, terorisme negara juga membajak aparatus hukum. Bukan hanya diabaikan, hukum dipelihara sebagai alat teror. Tanpa mengurangi hormat kepada para aktivis dan ahli hukum yang teguh melawan represi negara, kita layak waspadai pada risiko beberapa perdebatan tentang hukum pidana yang mengecoh.

Dalam kerangka besar te-

rorisme negara, rincian pasal-pasal pidana tidaklah relevan. Tak peduli betapa pun konyol atau rapi rumusan pasal-pasal itu, hukum tidak dijalankan serius, konsisten, dan berimbang. Hukum kadang dipakai berlebihan, kadang dabaikan. Perdebatan formal mengenai pasal-pasal pidana mengalihkan perhatian publik dari inti masalah, yakni terorisme negara.

Ratusan soal remeh-temeh diangkat jadi kasus pidana. Sementara skandal besar kejahanan kemanusiaan ditutup impunitas selama berpuluhan tahun. Kasus remeh-temeh dijadikan kontroversi untuk menguras perhatian dan emosi publik. Jika sudah agak mereda, dibuat kontroversi baru dengan kasus remeh-temeh yang lain.

Dalam konteks terorisme negara, tujuan utama hukum menciptakan rasa takut mencakm di ruang publik agar semua patuh pada penguasa. Ketidakpastian hukum menjadi salah satu metode untuk merawat rasa takut yang berkelanjutan. Cara lain yang lazim adalah kriminalisasi pengkritik. Isi dan rumusan pasal-pasal pidana hanya dekorsi embel-embelnya.